

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber buku

- Achmad, A., & Maskanah, U. (2020). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek (Class Action, Gugatan Sederhana, E-Court dan E-Litigasi) Dilengkapi Yurisprudensi* (1st ed., Vol. 1). Logoz Publishing.
- Andrianto. (2020). *MANAJEMEN KREDIT Teori dan Konsep Bagi Bank Umum* (Qiara Meedia, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV. Penertbit Qiara Media.
- Ashilby. (2018). *Hukum Jaminan* (L. Faruqi, Ed.; 1st ed., Vol. 1). MIH Unihaz.
- Asyhadie, Z. (2018). *Hukum keperdataaan : (dalam perspektif hukum nasional KUH perdata (BW) hukum Islam dan hukum adat)*. Rajawali Pers.
- Bahsan, M. (2012). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Budiono, H. (2016). *Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan : buku kesatu* (Vol. 4). PT. Citra Aditya Bakti.
- Christiawan Rio, & Saputra Januar Agung. (2021). *Jaminan Hak Tanggungan* (R. Kurnia, Ed.; Vol. 1, pp. 7–8). PT REFIKA ADITAMA.
- Deliarnoor, N. A. (2019). *Sistem Hukum Indonesia* (A. Sosiawan & T. Wahyuningsih, Eds.; 1st ed., Vol. 1). Universitas Terbuka.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram University Press.
- Dr. Rio Christiawan. S. H., M. Hum. , M. Kn., & Dr. Januar Agung Saputra. S. H., M. Hum. M. M. (2021). *Jaminan Hak Tanggungan* (R. Kurnia, Ed.; Vol. 1, pp. 27–37). PT REFIKA ADITAMA.
- Fuady, M. (2002a). *Hukum Perkreditan Kontemporer* (Vol. 2). PT. Bandung Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2002b). *Pengantar hukum bisnis, menata bisnis modern di era global* (Vol. 1). Citra Aditya Bakti.

- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria indonesia: Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. Djambatan.
- Irene Svinarky. S. H., M. Kn. (2019). *Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Medelyn Sonya Mikoshi, Frederich S. B, Dra. Rini Dika Yanti, Drs. Davitson, & M. SI. Mesri Silalahi. S. Kom., Eds.; 1st ed.). CV. Batam Publisher.
- Kosasih, J. I., & Haykal, H. (2021). *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*. Sinar Grafika.
- Leonard, B. (2023, January). *Pengertian APHT & SKMHT, Biaya, dan Contohnya Terbaru 2023*. Rumah.Com. rumah.com
- M. Muhtarom. (2014). ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN SUATU LANDASAN DALAM PEMBUATAN KONTRAK. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Mongdong, S. V. (2017). EKSISTENSI SURAT KUASA TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH DITINJAU DARI KUHPERDATA. *Lex Privatum*, 5. <https://media.neliti.com/>
- Perangin, E. (1991). *Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit*. Rajawali Pers.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku 1 (Vol. 2). PT. Citra Aditya Bakti.
- Subagiyo, D. T. (2018). *HUKUM JAMINAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA (Suatu Pengantar)* (A. Purwadi, Ed.). UWKS Press Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Sumardjono, M. S. W. (1996). *Hak Tanggungan dan Fidusia*. Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, A. (2018). *Hukum Hak Tanggungan*. Sinar Grafika.
- Syahmin. (2006). *Hukum Perjanjian Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya bakti.

- Syamsuddin, R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia* (1st ed., Vol. 1).
PENADAMEDIA GROUP.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y., & Markus, Y. H. (2010). *Teori hukum : strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Genta Publishing.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005
 Peraturan Menteri Badan Pertanahan Nasional N0. 3 Tahun 1996
 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah.
 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-
 Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
 Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penetapan Batas Waktu
 Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin
 Pelunasan Kredit Tertentu

C. Sumber Lain

- Djatmiko, A. A. (2017). AKTUALISASI PRINSIP 5C (PRINSIP-PRINSIP LIMA)
 PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK
 ATAS TANAH BELUM BERSERTIFIKAT . *Journal.Unita.Ac.Id.*
journal.unita.ac.id
- Julian, M. (2019, June). *Hapusnya Hak Tanggungan*. Hukumproperti.Com.
hukumproperti.com

- Julyano, M., Sulistyawan, A. Y., & Soedarto. (2019). PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM. *JURNAL CREPIDO “Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum,”* 1.
- Kamsidah. (2023, February). *Bagaimana Pengaturan Jaminan Dalam Perspektif KUHPerdata.* Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id.
- Leonard, B. (2023, January). *Pengertian APHT & SKMHT, Biaya, dan Contohnya Terbaru 2023.* Rumah.Com. rumah.com
- Mongdong, S. V. (2017). EKSISTENSI SURAT KUASA TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH DITINJAU DARI KUHPERDATA. *Lex Privatum*, 5. <https://media.neliti.com/>
- Nurhayati, & Gueti, R. S. (2019). KEBERLAKUAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN(SKMHT) TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA TANGERANG SELATAN. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6.
- Oktaria, E. T. (n.d.). PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI BENTUK PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH LEMBAGA PERBANKAN. *Perkembangan Hukum Di Indonesia.*
- Pandiangan, E. (2021, June 30). *Jenis-Jenis Surat Kuasa Dalam Hukum Perdata.* Eap-Lawyer.Com. eap-lawyer.com
- peraturan.bpk.go.id. (2017, December). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu.* Peraturan.Bpk.Go.Id. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Raskita J.F. Surbakti. (2022). ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN SURAT KUASA YANG MELEBIHI TUJUANNYA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1189K/PDT/2017

- DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR
104//PDT.G/2012/PN. CBN). *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, 3.
- Redaksi Justika. (2022, July). *Unsur atau Isi Surat Kuasa Khusus*. Justika.Com.
Justika.com
- Slamet, R. S., Muliawan, A., & Kandou, H. (2022). PEMBAHARUAN HUKUM
JAMINAN INDONESIA. *Lex Jurnalica*, 19.
- Subhan, M., Anzward, B., & Roziqin. (2020). KEPESTIAN HUKUM SURAT
KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT
KETERLAMBATAN MENERBITKAN AKTA PEMBERIAN HAK
TANGGUNGAN LEGAL SURE OF POWER OF ATTORNEY LOADS
LIABILITY RIGHTS AS A RESULT OF LATE ISSUED ASSETS FOR
GRANTING LIABILITY. *Jurnal De Facto*, 7. <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/>
- Tim Editorial Rumah.com. (2022, December). *Jangka Waktu SKMHT (Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan) untuk Jaminan Pelunasan Kredit Tertentu*.
Rumah.Com. rumah.com
- Tim Hukum Online. (2022, May 17). *5 Asas-Asas Hukum Perdata terkait Perjanjian*.
<Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/a/Asas-Asas-Hukum-Perdata-Lt62826cf84ccbf>.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (n.d.). *Jaminan*.
Balai Pustaka Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Utami, K. D. A. (2014). PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS
TANAH BERDASARKAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN (Kajian
Terhadap Putusan Nomor: 1860K/Pdt/2005). *Arena Hukum*, 7.